



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 170/15/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2026 dilaksanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 dilaksanakan agar pembentukan Peraturan Daerah dapat terarah, terpadu, dan sesuai dengan skala prioritas;

c. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 dilaksanakan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan dan disetujui dalam Rapat Paripurna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 April 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



SRIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI
NOMOR 170/15/2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

A. RAPERDA-RAPERDA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ. /KET.			
1.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin		✓	1.UU Nomor 6 Tahun 2011; 2.UU Nomor 6 Tahun 2023; 3.Perda Prov. Jateng Nomor 1 Tahun 2022.	✓		Bapemperda DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
2.	Perda	Penyelenggaraan Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	✓		1. UU Nomor 11 Tahun 2020 2. PP Nomor 22 Tahun 2021	✓		Bapemperda DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
3.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah	Perubahan larangan, hak, kewajiban,		✓	1. UU Nomor 23 Tahun 2014;	✓		Bapemperda DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ. /KET.			
		Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	kewenangan, pusat pelayanan terpadu, upaya pencegahan, perlindungan hukum, fasilitasi system peradilan, prtisipasi masyarakat, perlindungan korban serta pengendalian, pembinaan dan pengawasan.			2. Perda Prov. Jateng Nomor 1 Tahun 2021; 3. Perda Prov. Jateng Nomor 2 Tahun 2022;					Tahun 2024
4.	Perda	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, perlindungan khusus anak, pemberantasan, penanganan, kerja sama serta partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat	✓		1. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019; 2. Perda Prov. Jateng Nomor 1 Tahun 2021.	✓		Komisi I DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
5.	Perda	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	✓		1. Perpres Nomor 125 Tahun 2012; 2. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012.	✓		Komisi II DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ. /KET.			
6.	Perda	Pengelolaan Pasar Rakyat	Pengelolaan Pasar Rakyat	✓		PP Nomor 29 Tahun 2021.	✓		Komisi II DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
7.	Perda	Pemberdayaan Desa Wisata	Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Wisata	✓		1.UU Nomor 10 Tahun 2009; 2.UU Nomor 6 Tahun 2014; 3.Perda Prov. Jateng Nomor 2 Tahun 2019.	✓		Komisi II DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
8.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah		✓	PP Nomor 22 Tahun 2021	✓		Komisi III DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
9.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogin Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau		✓	PP Nomor 21 Tahun 2021	✓		Komisi III DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
10.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogin Nomor 22 Tahun	Pemenuhan Pendidikan Karakter		✓	Perpres Nomor 87 Tahun 2017	✓		Komisi IV DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ. /KET.			
		2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan									
11.	Perda	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak dan pengampuan, koordinasim kerja sama	✓		1. UU Nomor 52 Tahun 2009; 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 3. Perda Prov. Jateng Nomor 2 Tahun 2018.	✓		Komisi IV DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
12.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perlindungan dan hak Pemenuhan hak penyandang disabilitas		✓	1. UU Nomor 8 Tahun 2016; 2. Perda Prov. Jateng Nomor 2 Tahun 2023.		✓	Komisi IV DPRD	Tahun 2026	Luncuran Propemperda Tahun 2024
13.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	penambahan objek retribusi berdasarkan usulan Perangkat Daerah		✓	1. UU Nomor 1 Tahun 2022; 2. PP Nomor 35 Tahun 2023.		✓	1. BPKD; 2. Bagian Hukum Setda	Tahun 2026	-

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN	KET.
				BARU	UBAH		NA	PENJ. /KET.			
14.	Perda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mengatur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memuat secara detail buku rencana dan album peta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	✓		1. UU Nomor 1 Tahun 2011; 2. PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021.	✓		1. Dispera dan KPP; 2. Bagian Hukum Setda	Tahun 2026	-
15.	Perda	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri	1. Jenis usaha; 2. Jumlah direksi; 3. Penghasilan direksi; 4. Penghasilan dewas; 5. Penghasilan pegawai; 6. Biaya operasional; 7. Kepegawaian; 8. Struktur organisasi; dan 9. Penetapan dan penggunaan laba.	✓		1. PP Nomor 54 Tahun 2017; 2. Permendagri Nomor 23 Tahun 2024	✓		1. Bagian Perekonomian Setda 2. Bagian Hukum Setda	Tahun 2026	-

B. DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No.	DAFTAR RAPERDA KUMULATIF TERBUKA
1.	Raperda Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Agung
2.	Raperda Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



SRIYONO